



# HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 26, No. 1, APRIL 2011

ISSN - 0215-8809

- ≡ **PERKEBUNAN DAN KESEJAHTERAAN**  
S. Nawayanto
- ≡ **NASIONALISME JEPANG PADA ERA TOKUGAWA DAN MEDI**  
Y.R. Subakti
- ≡ **HISTORISISME DAN NEO HISTORISISME**  
H. Purwanta
- ≡ **CATATAN SINGKAT TENTANG PERISTIWA 15 JUNI 1974  
(RIVALITAS ALI MOERTOPO DAN SOEMITRO)**  
Ignatius Bayu Sudibyo
- ≡ **PERANAN AMIEN RAIS DALAM PARTAI AMANAT NASIONAL TAHUN  
1998-2005**  
Kristina Hestiyanti Ika Dewi

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra  
Universitas Sanata Dharma  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

# **HISTORIA VITAE**

## **SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH**

---

**HISTORIA VITAE** adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/ atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/ atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

---

### **DEWAN REDAKSI**

Pemimpin Umum/Penanggung jawab/ : Dr. Anton Haryono, M.Hum.  
Pemimpin Redaksi  
Anggota Dewan Redaksi : Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.  
Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

---

### **REDAKTUR AHLI**

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya SJ, M.A. .... Universitas Sanata Dharma Yogyakarta  
Dr. S. Nawiyanto ..... Universitas Jember

---

### **REDAKTUR PELAKSANA**

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.  
Dra. Theresia Sumini, M.Pd.  
Drs. A.A. Padi

---

### **SEKRETARIAT ADMINISTRASI**

R. Marsidiq

---

### **ALAMAT REDAKSI**

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma  
Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383  
Telegram: SADHAR YOGYA  
E-mail: [spps@staff.usd.ac.id](mailto:spps@staff.usd.ac.id)

---

# HISTORIA VITAE

## SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

---

### DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
Editorial .....	iii
<i>Perkebunan dan Kesejahteraan</i> .....	1 - 12
<i>S. Nawiyanto</i>	
<i>Nasionalisme Jepang pada Era Tokugawa dan Meiji</i> .....	13 - 36
<i>Y.R. Subakti</i>	
<b><i>Historisisme dan Neo Historisisme</i></b> .....	37 - 56
<i>H. Purwanta</i>	
<i>Catatan Singkat Tentang Peristiwa 15 Januari 1974</i> <i>(Rivalitas Ali Moertopo dengan Soemitro)</i> .....	57 - 72
<i>Ignatius Bayu Sudibyo</i>	
<i>Peranan Amien Rais dalam Partai Amanat Nasional Tahun 1998-</i> <i>2005</i> .....	73 - 84
<i>Kristina Hestiyanti Ika Dewi</i>	

## EDITORIAL

**HISTORIA VITAE** hadir kembali dengan lima tulisan dengan tema beragam. S. Nawiyanto mengawalinya dengan kajian tentang *Hubungan antara Perkebunan dan Kesejahteraan*. Ia berusaha membandingkan operasi perkebunan pada dua konteks politik yang berbeda, kolonial dan *post* kolonial. Y.R. Subakti menyambunginya dengan kajian tentang *Nasionalisme Jepang pada Era Tokugawa dan Meiji*. Ia mendiskripsikan faktor-faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal yang telah mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya nasionalisme Jepang itu. H. Purwanta menyajikan pada jurnal ini kajian tentang *Hinstorisisme dan Neo Historisisme*. Ia berusaha melakukan studi perbandingan mengenai kedua hal tersebut dalam rangka menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya.

Dua tulisan lain disajikan oleh Ignatius Bayu Sudiby, tentang *Peristiwa 15 Januari 197*, dan Kristina Hestiyanti tentang *Peranan Amien Rais dalam Partai Amanat Nasional (PAN) Tahun 1998-2005*. Bayu mencoba untuk melihat kembali terjadinya rivalitas antara Ali Moertopo dan Soemitro. Sementara itu Hesti berusaha untuk mendeskripsikan peran besar dan mendasar Amien Rais bagi tumbuh dan berkembangnya partai politik yang kini dinahkodai oleh Hatta Rajasa, yakni PAN.

Selamat membaca.

Redaksi

## HISTORISISME DAN NEO HISTORISISME

H. Purwanta

### Abstrack

*Many people thought that new historicism is a next step development of historicism and confused about their differences. Through this article I want to explain the nature both historicism and new historicism and comparing them to find their similarities and differences. Historicism is a name of philosophy of history branch which is believed that all nations history develop in a same track. The development is guided by reason. On the other side, new historicism or neo historicism of an intellectual movement which analyze literature from its cultural and historical context.*

### Pengantar

Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi, diciptakan oleh manusia untuk memenuhi idealisme tertentu. Ilmu-ilmu alam diciptakan untuk memahami dinamika alam, menemukan pola atau hukum-hukumnya dan kemudian digunakan sebagai dasar memprediksi dan memanipulasi alam untuk mendukung kehidupan manusia. Sejalan dengan itu, ilmu-ilmu sosial yang berkembang lebih kemudian juga berusaha memahami dinamika kehidupan manusia, menemukan pola atau hukum-hukumnya dan kemudian digunakan sebagai dasar prediksi dan pengambilan kebijakan untuk mendukung kehidupan bersama. Berbeda dengan itu, ilmu-ilmu humaniora berusaha memahami dan memaknai fenomena kemanusiaan untuk mengembangkan manusia sebagai pribadi yang utuh dan otonom.

Dari ketiga kategori yang ada, di manakah posisi ilmu sejarah? Akankah sejarah masuk ilmu humaniora dan menggarap aspek batiniah manusia? Ataukah akan masuk ke ilmu-ilmu sosial dan menjadi penganut kepercayaan pada hukum semesta manusia? Pada berbagai universitas di Indonesia, ilmu sejarah masuk ke Fakultas Ilmu Budaya

---

*Drs. H. Purwanta, M.A., adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.*

atau bahkan Fakultas Sastra. Hal itu mengindikasikan bahwa ilmu sejarah lebih cenderung ke ilmu humaniora. Akan tetapi, apabila dilihat dari kajian-kajian yang dilakukan banyak menggunakan *Covering Law Model*, ilmu sejarah cenderung menjadi bagian ilmu-ilmu sosial. Dipergunakannya pendekatan ilmu-ilmu sosial oleh Sartono School kiranya dapat dibaca adanya keinginan ilmu sejarah di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ilmu-ilmu sosial.

Pergumulan intelektual sejarawan dalam menentukan posisi keilmuan merupakan masalah yang telah lama berlangsung dan sampai sekarang belum terselesaikan. Salah satu tonggak awal pergumulan itu adalah lahirnya historisme, historisisme dan berbagai pandangan lain tentang ilmu sejarah. Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, pada kesempatan ini akan dibahas:

1. Historisisme
2. Neo Historisisme
3. Perbandingan antara Historisisme dengan Neo Historisisme

### **Historisisme**

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa krisis identitas keilmuan menjadi salah satu faktor penting lahirnya historisisme. Krisis itu secara singkat dijelaskan oleh Ankersmit (1987: 206):

Filsafat pada abad ke-17, yang berpangkal pada Descartes, hanya sedikit perhatiannya bagi sejarah...para ahli berpikir percaya penuh pada penelitian ilmu-ilmu alam; mereka berpendapat bahwa metoda penelitian dari ilmu alam hendaknya juga diterapkan pada bidang-bidang lain. Bila dipandang dari sudut itu, maka pengkajian sejarah kelihatan sangat kurang berbobot. Orang menyangsikan dan kurang percaya akan hasil penelitian ilmu sejarah.

Dari kutipan itu dapat diambil pemahaman bahwa krisis disebabkan oleh dua masalah yaitu kurangpercayaan masyarakat pada kajian yang dilakukan oleh sejarawan dan keinginan agar metode dari ilmu-ilmu alam diterapkan pada ilmu sejarah. Permasalahan pertama bersumber pada subyektivitas sejarah yang dipandang sebagai kelemahan mendasar ilmu sejarah untuk memperoleh kebenaran

obyektif. Permasalahan kedua, obyek kajian ilmu sejarah sudah hilang dan tak dapat dihadirkan kembali, sehingga metode ilmu-ilmu alam tidak dapat menjangkaunya.

Ketika abad berganti, berbagai krisis yang terjadi nampak mulai memperoleh pemecahan, meskipun tidak seluruhnya. Pada masa aufklarung ini, etika menjadi pendobrak kebekuan. Etika dipandang mampu menemukan kaidah-kaidah etis dan politis bagi kelakuan manusia dan kehidupan masyarakat sejajar dengan kepastian yang terdapat pada hukum alam. (Ankersmit,1987: 207) Fenomena itu mendorong para sejarawan tidak lagi hanya melaporkan temuan sumber dan artefak, tetapi juga memaknainya.

Selain krisis keilmuan yang dialami oleh sejarah, fenomena lain yang tak kalah penting adalah "tantangan" dari keyakinan agama. Pada akhir abad XVIII berkembang pandangan bahwa akal budi manusia memiliki batas, sehingga ilmu pengetahuan yang dapat dikembangkan juga terbatas. Ilmu hanya mampu menjelaskan fenomena yang dapat dilihat dan diamati secara kasat mata. Hal-hal yang bersifat metafisis tidak akan mampu dipahami dengan akal maupun refleksi filosofis. (Dietmar H. Heidemann pada Dean Moyar and Michael Quante, 2008, p. 4). Permasalahan itu hanya dapat dipahami dengan iman dan agama. Pada situasi ketertekanan seperti itulah pergumulan intelektual akhirnya melahirkan historisisme dengan GWF Hegel (1770 -1831) sebagai pionirnya (.Dietmar H. Heidemann p. 7)

Hegel diverged from Schelling, arguing that the absolute or "God as the one Substance" (18, {17) cannot be just substance and nothing more. The concept of the true or absolute conceived as the one substance is underdetermined to the extent that it does not adequately incorporate thought and hence precludes self-determining subjectivity. There are two questions concerning this view: First, why is the determination of the true or absolute as substance insufficient? Secondly, even if an additional determination is necessary, why is it subject or subjectivity, and in what sense?

Terkait dengan ilmu sejarah, Hegel mengkategorikan kajian sejarah menjadi tiga kelompok besar, yaitu sejarah rekonstruktif, sejarah reflektif dan filsafat sejarah. Sejarah rekonstruktif adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh sejarawan atau orang yang tertarik pada peristiwa

sejarah. Hasil rekonstruksi sejarah biasanya berupa uraian tentang suatu peristiwa yang terjadi pada lokasi dan waktu tertentu. (Hegel, 2001, p. 14).

To this category belong *Herodotus, Thucydides*, and other historians of the same order, whose descriptions are for the most part limited to deeds, events, and states of society, which they had before their eyes, and whose spirit they shared. They simply transferred what was passing in the world around them, to the realm of representative intellect.

Kelompok kedua adalah sejarah reflektif yang oleh Hegel ditempatkan di atas sejarah sebagai narasi. Apabila sejarah rekonstruksi sejarah hendak menjelaskan genealogi suatu peristiwa, sejarah reflektif menggabungkan berbagai hasil rekonstruksi. Hegel membagi sejarah reflektif dalam empat kategori. Pertama adalah sejarah yang ditulis dengan tujuan hendak menangkap semangat di balik rekonstruksi sejarah yang dipandang penting bagi masyarakat sekarang: *It is history whose mode of representation is not really confined by the limits of the time to which it relates, but whose spirit transcends the present.* (p. 17) Selain menangkap jiwa jaman, sejarah reflektif juga berusaha untuk mengevaluasi penulisan untuk menemukan metode penelitian sejarah yang lebih baik, “... *we are always beating our brains to discover how history ought to be written. This first kind of Reflective History is most nearly akin to the preceding, when it has no further aim than to present the annals of a country complete.* (Hegel, 2001, p. 18)

Model kedua sejarah reflektif oleh Hegel dinamakan Pragmatical, yaitu fungsi praktis dari mempelajari berbagai narasi sejarah. Dengan kata lain, model kedua lebih mengeksplorasi fungsi didaktik narasi sejarah terhadap masyarakat kontemporer. (Hegel, 2001, p. 19)

When we have to deal with the Past, and occupy ourselves with a remote world, a Present rises into being for the mind – produced by its own activity, as the reward of its labor. The occurrences are, indeed, various; but the idea which pervades them – their deeper import and connection – is *one*. This takes the occurrence out of the category of the Past and makes it virtually Present. Pragmatical (didactic) reflections, though in their nature



decidedly abstract, are truly and indefeasibly of the Present, and quicken the annals of the dead Past with the life of today.

Dari kutipan itu dapat dipahami bahwa fungsi didaktik sejarah adalah menumbuh-kembangkan kesadaran sejarah. Apabila dikaitkan dengan pandangan Nietzsche bahwa manusia adalah makhluk yang belum ditentukan takdirnya (*noch nicht*), maka dalam konteks ini sejarah merupakan teman berdialog selama “proses menjadi” tersebut.

Model sejarah reflektif yang ketiga oleh Hegel disebut sebagai *Critical*, yaitu kajian terhadap berbagai narasi sejarah yang telah ada untuk menemukan kebenaran. Melalui pembacaan kritis terhadap historiografi dengan mengkomparasi dan mengkonfrontasi, akan ditemukan kebenaran penjelasan historis yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan sekaligus dapat diterima publik pembaca sejarah. (Hegel, 2001, p. 20).

This deserves mention as pre-eminently the mode of treating history now current in Germany. It is not history itself that is here presented. We might more properly designate it as a History of History; a criticism of historical narratives and an investigation of their truth and credibility.

Model sejarah reflektif keempat adalah pengambilan kesimpulan umum terhadap berbagai kajian sejarah pada aspek-aspek kehidupan yang berkembang. Hegel mencontohkan pengkajian reflektif terhadap berbagai narasi sejarah seni, religi, ekonomi dan sebagainya. (Hegel, 2001, p. 21).

The last species of Reflective History announces its fragmentary character on the very face of it. It adopts an abstract position; yet, since it takes general points of ..., it forms a transition to the Philosophical History of the World. In our time this form of the history of ideas has been more developed and brought into notice. Such branches of national life stand in close relation to the entire complex of a people's annals; and the question of chief importance in relation to our subject is, whether the connection of the whole is exhibited in its truth and reality, or referred to merely external relations.

Kategori kajian sejarah yang terakhir, menurut Hegel adalah filsafat sejarah. Berbeda dengan dua jenis kajian sejarah sebelumnya, filsafat sejarah berusaha untuk memperoleh intisari dari berbagai fenomena historis yang terjadi. *The most general definition that can be given, is, that the Philosophy of History means nothing but the thoughtful consideration of it. Thought is, indeed, essential to humanity. It is this that distinguishes us from the brutes.* (Hegel, 2001, p. 21) Obyek yang dikaji pun berbeda. Filsafat sejarah tidak mengkaji sejarah secara material atau fisik, seperti sumber maupun historiografi, tetapi membahas hal-hal yang bersifat metafisik. Metode yang digunakan filsafat sejarah pun khas, yaitu dengan melakukan kontemplasi intelektual melalui pengembangan premis-premis logis dan rasional untuk memperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Hegel, 2001, p. 22 – 23)

The only Thought which Philosophy brings with it to the contemplation of History, is the simple conception of *Reason*; that Reason is the Sovereign of the World; that the history of the world, therefore, presents us with a rational process. This conviction and intuition is a hypothesis in the domain of history as such. In that of Philosophy it is no hypothesis. It is there proved by speculative cognition, that Reason – and this term may here suffice us, without investigating the relation sustained by the Universe to the Divine Being – is *Substance*, as well as *Infinite Power*; its own *Infinite Material* underlying all the natural and spiritual life which it originates, as also the *Infinite Form* – that which sets this Material in motion.

Kedudukan uraian Hegel tentang ragam kajian terhadap sejarah adalah sangat penting, yaitu menjelaskan posisi yang hendak diambilnya. Pada uraian berikutnya dijelaskan bahwa Hegel memilih kajian filsafat sejarah, sehingga pembahasannya berfokus pada usaha untuk mencari substansi atau hakekat gerak sejarah. Hal ini perlu ditegaskan karena terkait dengan kritik yang disampaikan oleh sejarawan seaman, yaitu Leopold von Ranke. Dia sangat menentang penjelasan sejarah model historisisme. Pernyataannya yang terkenal dan mendasari lahirnya historisme adalah bahwa tugas sejarah semata-mata untuk menunjukkan apa yang senyatanya terjadi (*wie es eigentlich gewesen ist*) dan bukan untuk menemukan teori: *“My understanding of 'leading ideas' is simply that they are the dominant tendencies in each century. These*

*tendencies, however, can only be described; they can not, in the last resort, be summed up in a concept."*

([http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold\\_von\\_Ranke](http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Ranke))

Kritik Ranke, yang dipandang sebagai bapak sejarah modern, perlu ditanggapi dengan jernih. Pernyataannya bahwa "tugas sejarah semata-mata untuk menunjukkan apa yang senyatanya terjadi" sangat tepat apabila ditujukan pada sejarah kategori pertama dalam kategorisasi Hegel, yaitu rekonstruksi sejarah. Penjelasan Ranke tentang "*leading idea*" sebagai kecederungan yang dominan para periode waktu tertentu akan tepat untuk membahas sejarah reflektif. Dari sudut pandang ini, kritik Ranke bahwa sejarah tidak dapat dibuat kesimpulan dalam bentuk konsep kurang dilengkapi dengan alasan-alasan filsafati yang kuat. Dengan kata lain, kritik Ranke kurang menyentuh posisi yang diambil oleh Hegel, yaitu filsafat sejarah.

Pemikiran inti historisisme secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dalam semesta kehidupan ini terdapat sesuatu yang mengatur segala sesuatu atau hukum semesta, yang oleh Hegel disebut sebagai *Reason*. (Hegel, 2001, p. 25)

One of these points is, that passage in history, which informs us that the Greek Anaxagoras was the first to enunciate the doctrine that \_\_, Understanding generally, or Reason, governs the world. It is not intelligence as self-conscious Reason – not a Spirit as such that is meant; and we must clearly distinguish these from each other. The movement of the solar system takes place according to unchangeable laws. These laws are Reason, implicit in the phenomena in question. But neither the sun nor the planets, which revolve around it according to these laws, can be said to have any consciousness of them.

A thought of this kind – that Nature is an embodiment of Reason; that it is unchangeably subordinate to universal laws, appears nowise striking or strange to us....

Tanggungjawab *Reason* adalah mengatur segala sesuatu agar tercipta ketertiban dan keharmonisan antar bagian-bagiannya.

The inquiry into the *essential destiny* of Reason – as far as it is considered in reference to the World – is identical with the question, *what is the ultimate design of the World?* And the expression implies that that design is destined to be realized. Two points of consideration suggest themselves; first, the *import* of this design – its abstract definition; and secondly, its *realization*.

2. Sebagai bagian dari semesta, kehidupan manusia juga tunduk terhadap hukum semesta, yaitu *Reason* tersebut. Agar pikiran dan perilaku dalam menyejarah sesuai dengan hukum semesta, dalam setiap diri manusia terdapat jiwa atau roh.

It must be observed at the outset, that the phenomenon we investigate – Universal History – belongs to the realm of *Spirit*. The term "*World*," includes both physical and psychical Nature. Physical Nature also plays its part in the World's History, and attention will have to be paid to the fundamental natural relations thus involved. But *Spirit*, and the course of its development, is our substantial object. Our task does not require us to contemplate Nature as a Rational System in itself – though in its own proper domain it proves itself such – but simply in its relation to *Spirit*.

3. Variasi kehidupan antar lokasi yang terjadi karena adanya adaptasi unsur pengatur dengan kondisi lokal. Dari sudut pandang ini, untuk memahami peri kehidupan manusia diperlukan penemuan unsur pengatur perilaku. Dalam konteks ini, ilmu sejarah dan ilmu-ilmu kemanusiaan lainnya bertugas untuk menganalisis masa lampau guna menemukan unsur pengatur itu. Hegel menemukan *Geist* (Jiwa, Roh, Budi), sedang Karl Marx menemukan alat produksi sebagai penggerak sejarah.

Culture is essentially concerned with Form; the work of Culture is the production of the Form of Universality, which is none other than Thought. Consequently Law, Property, Social Morality, Government, Constitutions, etc., must be conformed to general principles, in order that they

may accord with the idea of Free Will and be Rational. Thus only can the Spirit of Truth manifest itself in Subjective Will – in the particular shapes which the activity of the Will assumes. In virtue of that degree of intensity which Subjective Free Spirit has attained, elevating it to the form of Universality, Objective Spirit attains manifestation. This is the sense in which we must understand the State to be based on Religion. States and Laws are nothing else than Religion manifesting itself in the relations of the actual world. (p. 435 – 436)

4. Sejarah merupakan perkembangan linier dari satu titik di masa lampau dan akan menuju titik yang lain di masa depan. Bila titik akhir itu tercapai, maka manusia akan memasuki masa “the end of history”. Melalui penemuan unsur pengatur di masa lampau, ilmu sejarah mampu menyumbang untuk memahami dinamika kehidupan manusia masa kini serta memprediksi masa depan dengan tingkat presisi yang tinggi. Hegel membagi perjalanan sejarah umat manusia menjadi tiga tahap, yaitu Jiwa Obyektif (dunia Timur), Jiwa Subyektif (Yunani-Romawi) dan Jiwa Mutlak (German Raya) yang merupakan paduan sempurna dua jiwa sebelumnya. Berbeda dengan Hegel, Marx membagi sejarah berdasar alat produksi menjadi Tanah (Feodal), Industri-1 (Pemilik Modal/Kapitalisme) dan Industri-2 (Buruh/Komunisme).

Pemikiran kaum historisisme mengundang kontroversi, dari sejak lahirnya sampai sekarang. Dengan kata lain, penyusunan teori yang dimotori Hegel dipandang sebagai langkah terlalu jauh atau pengambilan generalisasi yang terlalu luas. Kritik mendasar juga datang dari Karl Popper melalui bukunya *The Poverty of Historicism* yang pada tahun 1985 diterjemahkan menjadi *Gagalnya Historisisme*. Dia menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu memprediksi secara ilmiah masa depannya, begitu pula tidak ada ilmu prediksi sejarah umat manusia.

### **Neo Historisisme**

Kelahiran neo historisisme tidak dapat dilepaskan dari dinamika ilmu pengetahuan, khususnya kajian sastra. Sejak Perang Dunia II, kajian

sastra menjadi disiplin yang eksklusif. Mereka membahas berbagai karya sastra dari aspek keindahan, struktur kebahasaan dan pesan-pesan tekstual yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 1960-an di antara para profesor sastra Eropa daratan muncul keinginan untuk menjadikan disiplin sastra memiliki peran dalam memahami dan memecahkan problem sosial aktual. Untuk itu, karya sastra perlu dilihat tidak lagi hanya secara eksklusif dari aspek estetika, tetapi ditempatkan sebagai representasi atau produk budaya dari jamannya.

Perubahan paradigma dalam memandang karya sastra melahirkan gerakan “kembali ke sejarah” dalam arti mengkaji historisitas dari teks karya sastra dan tektualitas karya sejarah (*the historicity of text and textuality of history*). Kajian historisitas teks karya sastra menjadikan penelitian tentang kondisi masyarakat yang melingkupi (istilah Sartono K.: konteks) kehidupan sastrawan penulisnya, baik melalui sumber primer maupun historiografi, merupakan keharusan untuk dilakukan. Dalam konteks ini, karya sastra secara tidak langsung diuji kesahihan interpretasinya (tektualitas sejarah).

Gerakan “kembali ke sejarah” yang dimunculkan para ahli sastra di Eropa daratan berkembang meluas ke Inggris dan Amerika Serikat dan dalam taraf tertentu dapat dikatakan sebagai mencapai kematangan. Istilah neo historisisme sendiri diperkenalkan oleh Stephen Jay Greenblatt pada awal tahun 1980-an dalam kajian-kajiannya tentang puisi kultural. Menurutnya, neo historisisme bukanlah doktrin, tetapi lebih merupakan model kerja atau best practice. Secara sederhana neo historisisme adalah metode penelitian tentang masa lampau berdasar penempatan dokumen historis dan non historis (karya sastra dll), antara sumber tertulis dengan non tertulis (gambar, anekdot dll) sebagai sumber yang sama-sama penting. Oleh karena kajian yang dilakukan lintas disiplin, neo historisisme lebih dikenal sebagai bagian dari Cultural Studies atau Kajian Budaya.

Salah satu tokoh terkenal dari neo historisisme adalah Foucault. Dalam bukunya yang berjudul *The Archeology of Knowledge*, dia membuka dengan permasalahan penggunaan berbagai konsep yang sampai sekarang masih digunakan (Michel Foucault, 1972):

The use of concepts of discontinuity, rupture, threshold, limit, series, and transformation present all historical analysis not only with questions of procedure, but with

theoretical problems. It is these problems that will be studied here (the questions of procedure will be examined in later empirical studies - if the opportunity, the desire, and the courage to undertake them do not desert me). These theoretical problems too will be examined only in a particular field: in those disciplines - so unsure of their frontiers, and so vague in content - that we call the history of ideas, or of thought, or of science, or of knowledge.

Salah satu konsep yang dikaji adalah kegilaan atau *madness*. Foulcaut (2006) menjelaskan bahwa konsep kegilaan dipahami berbeda-beda oleh masyarakat dari satu periode ke periode lainnya. Dalam pengantarnya dia menjelaskan (xvii):

We need a history of that other trick that madness plays - that other trick through which men, in the gesture of sovereign reason that locks up their neighbour, communicate and recognize each other in the merciless language of non-madness; we need to identify the moment of that expulsion,<sup>2</sup> before it was definitely established in the reign of truth, before it was brought back to life by the lyricism of protestation. To try to recapture, in history, this degree zero of the history of madness, when it was undifferentiated experience, the still undivided experience of the division itself. To describe, from the origin of its curve, that 'other trick' which, on either side of its movement, allows Reason and Madness to fall away, like things henceforth foreign to each other, deaf to any exchange, almost dead to each other.

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa pada Abad Pertengahan, kegilaan dihubungkan dengan penyakit lepra. Mereka dihilangkan dari ranah publik dan dikucilkan pada panti-panti yang terpisah jauh dari pemukiman penduduk. Foulcaut menunjukkan bahwa sejak Louis VIII membuat undang-undang rumah sakit lepra, di Perancis muncul 2000 kantor pendaftaran orang gila. Meski pada masa-masa berikutnya penyakit lepra secara bertahap hilang, praktek pengucilan tetap berjalan di masyarakat. Di Perancis, bekas rumah sakit lepra berubah fungsi menjadi penampungan anak-anak nakal. Praktek pengucilan itu,

menurut Foucault berakar pada ajaran gereja tentang penyerahan diri kepada Allah sebagai kunci keselamatan. Penyakit dipandang sebagai cobaan. Penderita harus menerima pengucilan dengan penuh pengertian dan kesabaran sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah.

Memasuki periode renaissance, konsep kegilaan mengalami perkembangan yang menarik. Foucault membandingkan pemahaman konsep kegilaan pada masa renaissance dengan konsep kematian yang populer pada masa akhir Abad Pertengahan (page 15):

The substitution of the theme of madness for that of death is not the sign of a rupture, but rather of a new twist within the same preoccupation. It is still the nothingness of existence that is at stake, but this nothingness is no longer experienced as an end exterior to being, a threat and a conclusion: it is felt from within, as a continuous and unchanging form of life. Whereas previously the madness of men had been their incapacity to see that the end of life was always near, and it had therefore been necessary to call them back to the path of wisdom by means of the spectacle of death, now wisdom meant denouncing folly wherever it was to be found, and teaching men that they were already no more than the legions of the dead, and that if the end of life was approaching, it was merely a reminder that a universal madness would soon unite with death.

Pandangan Foucault didukung dengan bukti berbagai karya sastra menggambarkan orang gila sebagai pelaut yang dengan kapal layarnya mengarungi lautan dan menjelajah dari satu kota ke kota lainnya dengan bebas untuk menemukan pulau keberuntungan dan kebenaran mereka sendiri. Bahkan dalam pentas drama *Praise of Folly* karya Erasmus orang gila digambarkan, meski tampak aneh dan tolol, sebagai pembawa kabar kebenaran dan pesan kebijaksanaan. Untuk mendukung pendapatnya, Foucault juga mengemukakan pergeseran pandangan gereja tentang kesengsaraan Yesus sebagai "*prestige of torture and innumerable dreams associated therewith*" (p. 17) dan perubahan pemaknaan masyarakat Inggris terhadap cerita rakyat tentang the gryllos sebagai simbol kegilaan, dari "*men ruled by their desires the soul became a prisoner of the beast*" menjadi "*a preponderant figure in the*



*innumerable Temptations*"(p. 18) Mengakhiri kajiannya tentang konsep kegilaan pada periode renaissance, Foulcaut memberikan kesimpulan bahwa dalam kegilaan itu masyarakat menemukan figur mengagumkan dengan panggilan hidupnya yang penuh misteri. (p.19)

Mengawali penjelajahannya di dunia kegilaan pada jaman *Aufklarung*, Foulcault menulis (p. 41):

Scarcely a century after the fashion for those ships, the literary theme of the 'Hospital for the Mad' is born. There each empty head, bound and classified by the true reason of men, speaks of contradiction and irony, in the double language of Wisdom:

the hospital for the incurably mad, where, point by point, all possible types of madness and all the maladies of the spirit are carefully mapped out, in both men and women, an enterprise that is both amusing and useful, and forms the only path to the acquisition of true wisdom.

There each form of madness has its place ready and waiting, its sign and its protective god. For frenzy and ranting madness, there is the fool strapped to the chair under the watchful eye of Minerva; for the sombre melancholics who haunt the countryside like hungry lone wolves there is Jupiter, the master of animal metamorphoses, and then there are the 'drunkard madmen', 'madmen with no memory or understanding', 'drowsy or half-dead madmen' and 'stale or empty-headed madmen'... A whole world of disorder, where every man has his place, and the *Praise of Reason* is sung in the manner of Erasmus. Already, in these primitive hospitals, *embarkation* has given way to *confinement*.

Kelahiran rumah sakit sebagai tempat pengucilan bagi orang gila merupakan kelanjutan dari praktek terhadap penderita lepra pada Abad pertengahan, meski merupakan kemunduran apabila dipandang dari periode renaissance. Pada abad XVII banyak rumah sakit dan panti rehabilitasi orang gila didirikan di Eropa (p. 47):

It is well known that the seventeenth century created vast houses of confinement, but it is less well known that in the city of Paris, one out of every hundred inhabitants found themselves locked up there within a matter of months. It is also recognized that the authorities made use of *lettres de cachet* and other arbitrary measures of imprisonment, but the juridical thinking behind such practices is less familiar. Since Pinel, Tuke and Wagnitz, we know that the mad underwent this process of confinement for a century and a half, until one day they were discovered in the wards of the Hôpital Général and in the cells of houses of correction, or among the population of the workhouses and *Zuchthäuser*. But it is rarely the case that their status there is clarified, or that what was meant by this enforced fraternization between the poor, the unemployed, the criminal and the insane is clearly understood. It was in these spaces of confinement that Pinel and the psychiatry of the nineteenth century met the mad, and – lest we forget – it was there too that they allowed them to remain, while claiming to be their liberators. Since the mid-seventeenth century, madness had been linked to this place of confinement, and to the gesture that designated it as its natural place.

Berbeda dengan saat menggambarkan konsep kegilaan pada masa renaissance yang banyak menggunakan karya sastra dan cerita rakyat, Foulcault membahas kegilaan dengan mempertanyakan pandangan kaum intelektual masa Aufklärung yang bercirikan rasionalisme. Salah satu yang dipermasalahkan adalah pandangan Descartes tentang kegilaan (p. 44):

On the methodical path of his doubt, Descartes came across madness beside dreams and all the other forms of error. Might the possibility of his own madness rob him of his own body, in the manner in which the outside world occasionally disappears through an error of the senses, or in which consciousness sleeps while we dream?

How could it be denied that these hands or this whole body are mine? Unless perhaps I were to liken myself to madmen, whose brains are so damaged by the persistent vapours of melancholia that they firmly maintain they are

kings when they are paupers, or say they are dressed in purple when they are naked, or that their heads are made of earthenware or that they are pumpkins, or made of glass.

Dalam kajiannya tentang penanganan kegilaan, Foulcaut menemukan fenomena yang menarik pada paruh kedua abad XVII. Fungsi Rumah Sakit (Hôpital Général) bergeser jauh dari asalnya. Meskipun namanya tetap, Hôpital Général tidak lagi berkait urusan medis, baik dari tujuan maupun fungsinya. Hôpital Général berubah tujuan dan fungsinya menjadi instrumen penguasa untuk menegakkan ketertiban, terutama pada masa-masa krisis ekonomi melanda. Hôpital Général menjadi tempat memenjara orang-orang yang dipandang berpotensi mengganggu ketertiban umum, termasuk di dalamnya orang-orang miskin dan gelandangan (p 48-49):

In Paris in 1656, the Hôpital Général was set up by royal decree. At first glance it looks like a simple process of reform, little more than an administrative reorganisation. Various establishments that already existed were grouped together into one common administration: the Salpêtrière, which had been rebuilt under the previous reign to be used as an arsenal, and Bicêtre, which Louis XIII had wanted to place under the Commanderie de Saint-Louis to make a house of retreat for army invalids. 'All the houses and hospitals appertaining to La Pitié, the Refuge in the Faubourg Saint-Victor, the Scipio house and hospital, La Savonnerie, and all the properties, squares, gardens, houses and buildings that depend upon them.' All were now assigned to the poor of Paris, 'of both sexes, whatever their age or place of origin, regardless of their quality or birth, and in whatever state they present themselves, able or disabled, sick or convalescent, curable or incurable'. Their function was to supply food and lodgings to anyone who presented themselves, or was sent there by a royal or judicial decree, and to look after the subsistence and good order of anyone else for whom there was no room, but who might in other circumstances find themselves staying at the Hôpital Général. These duties were entrusted to directors appointed for life, whose powers over inmates extended beyond the confines of the hospital, in effect to

anyone within their jurisdiction. 'They are granted full powers where authority, direction, administration, commerce, policing, tribunals, correction and punishment are concerned, over all the poor of Paris, both within the hospital and without.' The directors were also to appoint a physician, who would be paid an annual fee of one thousand pounds, and who was to reside at La Pitié and carry out visits to each hospital house twice a week. One fact is immediately clear: the Hôpital Général was not a medical establishment. It was more of a semi-judicial structure, an administrative entity that was granted powers to deliberate, judge and pass sentence independently of other pre-existing authorities and courts....

Selain menggeser tujuan dan fungsi rumah sakit, penanganan kegilaan pada periode Aufklärung juga mengalami proses sekularisasi. Apabila pada periode Abad Pertengahan dan Renaissance, penanganan kegilaan melibatkan gereja dan menggunakan justifikasi agama, pada periode Aufklärung peranan agama dan gereja dipinggirkan. Penanganan kegilaan semata-mata didasarkan pertimbangan rasional-sosial politik. Meskipun demikian, sekularisasi itu tidak berarti gereja tidak memiliki akses untuk terlibat. Melalui kongregasi yang ada, gereja ikut melibatkan diri dalam berbagai penanganan kegilaan (p 51):

Vincent de Paul reorganized Saint-Lazare, the largest of what were once the Leper Hospitals of Paris. On 7 January 1632, he signed a new contract with the 'Priory' of Saint-Lazare in the name of the Congregationists of the Mission, to receive 'people detained on the orders of his Majesty'. The Order of the Good Sons opened several hospitals of that ilk in the north of the country. The Brothers of Saint John of God, who had been in France since 1602, founded first the Charité de Paris in the faubourg Saint-Germain, and then Charenton, which opened on 10 May 1645. Not far from the capital, it was they again who set up the Charité de Senlis, which opened its doors on 27 October 1670. A few years earlier, the Duchess of Bouillon had donated the buildings and revenues accruing from the leprosarium that had been founded by Thibaut de Champagne in Château-Thierry in the fourteenth century.

Also under their control were the Charités of Saint-Yon, Pontorson, Cadillac and Romans. The year 1699 saw the foundation by the Lazarists of the establishment that was later to become the Saint-Pierre Hospital. In the eighteenth century, these were followed by Armentières (1712), Maréville (1714), the Bon Sauveur in Caen (1735) and, shortly before the Revolution, Saint-Meins in Rennes in 1780.

Dengan berdasar kenyataan bahwa penjara secara bertahap tidak hanya berisi orang gila, tetapi juga orang-orang miskin (gelandangan), pelaku kriminal dan orang-orang dengan berbagai permasalahan lain yang dikategorikan sebagai asosial, Foulcault berkesimpulan bahwa penjara berperan sebagai suatu mekanisme sosial. Mekanisme itu tumbuh menjadi sangat luas jangkauannya, dari masalah peraturan ekonomi yang sederhana sampai impian kaum borjuis tentang kota ideal yang dikelola oleh pemerintahan yang bijaksana dan menurut hukum alam. (p 78)

Selain perluasan kriteria orang yang dimasukkan penjara, Foulcaut juga menengarai adanya ketidakjelasan standard kegilaan yang digunakan. (108)

That experience can be summed up and almost symbolised in a single word that constantly recurs in all the registers of confinement. 'Frenzy' (*fureur*) and the adjective 'frenzied' (*furieux*) were, as we shall see, technical terms in case law and medicine, and indicated quite precisely a particular form of madness. But in the vocabulary of confinement, the words said both much more and much less, alluding to the forms of violence that escape the rigorous definition of crime and its juridical assignation, denoting an undifferentiated region of disorder - a disorder of the spirit, or a disordered way of life, a whole obscure region of menacing rage that did not yet form grounds for a possible condemnation. To our way of thinking this might appear a confused concept, but it was sufficiently clear to the classical age to dictate a moral and police imperative to confine. One of the powers that classical reason gave itself in its experience of unreason, was the possibility of

confining subjects by noting not that they were ill or criminal but simply that they were 'frenzied'.

This power had a positive meaning. When the seventeenth and eighteenth centuries confined madness together with debauchery and libertinage, the point is not that they had failed to diagnose an illness, but that they understood it in radically different terms.

Ketidakjelasan standard yang digunakan untuk menetapkan kegilaan menjadikan perlakuan yang diterapkan tidak ada bedanya antara gangguan mental, stres, neurosis, melankolis, atau schizoprenia.

Memasuki abad modern berbagai ketidakjelasan terhadap konsep kegilaan berlanjut. Foucault menjelaskan bahwa ada tiga institusi yang saling terkait dan dianggap paling bertanggungjawab atas penghakiman terhadap status kegilaan seseorang, yaitu dokter atau ahli medis; psikiatri; dan rumah sakit jiwa. Tiga institusi inilah yang memberikan label terhadap orang-orang gila ini sebagai orang yang berpenyakit jiwa.

### **Perbandingan**

Dari kajian yang dilakukan terhadap historisisme dan neo historisisme tampak bahwa keduanya memiliki berbagai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya antara lain terletak pada krisis identitas keilmuan sebagai latar belakangnya. Pada historisisme, krisis identitas itu terjadi karena berkembangnya ilmu-ilmu positif yang mampu menciptakan/ menemukan hukum-hukum alam dengan tingkat akurasi sangat tinggi. Oleh karena itu, historisisme berusaha mengembangkan filsafat sejarah yang mampu menemukan hukum-hukum gerak sejarah. Tokoh utamanya adalah Hegel yang menempatkan Geist (Jiwa/Roh) sebagai sumber gerak sejarah.

Latar belakang munculnya neo historisisme adalah kekurang-bermanfaatan ilmu sastra dalam kehidupan masyarakat. Ilmu sastra hanya mengkaji teks yang terkandung dalam karya sastra, baik puisi, prosa, maupun novel. Krisis itu kemudian melahirkan gerakan pengembangan dengan menempatkan karya sastra sebagai hasil budaya masyarakat, sehingga memiliki kaitan historis yang kompleks dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu tokoh utamanya adalah Foucault. Dua karya utamanya, yaitu *The Archeology of Knowledge* dan *History of Madness* menjelaskan bahwa kebenaran pengetahuan

secara kultural merupakan kebenaran subyektif. Selain itu, eksplorasinya tentang konsep kegilaan sampai pada kesimpulan bahwa kebenaran memiliki kaitan erat dengan kekuasaan.

Meskipun sama-sama dilatarbelakangi oleh krisis identitas keilmuan, historisisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan neo historisisme. Historisisme bertujuan untuk membangun *grand theory* (teori besar) yang berlaku di semua ruang dan waktu, sedang neo historisisme, seperti dikatakan Greenblatt, cenderung untuk mengembangkan metode penelitian atau *best practices*. Tujuan akhir dari kajian neo historisisme adalah untuk memahami historisitas teks dalam lingkup kultural tertentu.

Ditinjau dari sudut cara atau metode untuk mencapai tujuan, historisisme menggunakan kontemplasi historis, sedang neo historisisme menggunakan metode penelitian sejarah. Kontemplasi dilakukan dengan pembacaan terhadap semua hasil penelitian sejarah dan dilanjutkan dengan ekstraksi dan abstraksi berbagai ragam peristiwa historis menjadi proses satu alur. Di sisi lain, metode penelitian yang diterapkan oleh neo historisisme adalah mencari akar historis dari karya sastra dan sekaligus lingkungan kultural pengarang saat melahirkan karya sastra tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

- Ankersmit, F.R., 1987, *Refleksi Tentang Sejarah*. Terjemahan Dick Hartoko. Jakarta: Gramedia.
- Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt, 2000, *Practicing the New Historicism*, Chicago: University of Chicago Press.
- Foucault, Michel, 2002, *The Archeology of Knowledge*. New York: Routledge.
- Foucault, Michel, 2006, *History of Madness*. Terjemahan ke bahasa Inggris oleh Jonathan Murphy dan Jean Khalifa. New York: Routledge.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 2001, *Philosophy of History*. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh J. Sibree. Ontario: Batoche Books.
- Lemon, M.C., 2003, *Phylosophy of History*. New York: Routledge.
- Moyar, Dean and Michael Quante, 2008, *Hegel's Phenomenology of Spirit: A*

*Critical Guide*. Cambridge: Cambridge University Press.  
[http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold\\_von\\_Ranke](http://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_von_Ranke).

~~~~~